

BAB I

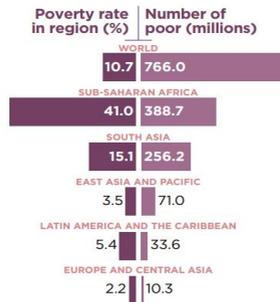
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kanada merupakan negara federal yang berada pada negara kelas menengah global yang menjalankan sistem multilateral. Negara yang saat ini berada pada kepemimpinan Justin Trudeau, mencoba mengeluarkan kebijakan-kebijakan berbasis gender yang berupaya untuk mengajak negara-negara berkembang untuk mengurangi kemiskinan dengan mempromosikan kesetaraan gender. Selama tiga dekade terakhir, dunia telah membuat keuntungan luar biasa dalam mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan telah menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi dan menyebabkan hidup menjadi lebih baik bagi banyak orang termasuk warga termiskin di dunia. Pada saat yang sama, jutaan orang terus berjuang menghadapi kemiskinan yang terus-menerus terjadi yang mengakibatkan ketidakesetaraan ekonomi sejumlah negara-negara di dunia, diperburuk oleh konflik kekerasan dan dampak perubahan iklim (Global Affairs Canada, 2017a).

Tingginya angka kemiskinan di dunia juga disebabkan oleh adanya ketidaksamaan kesempatan akses perempuan dan anak perempuan dalam pekerjaan yang diakibatkan oleh konstruksi gender dimana perempuan dan anak perempuan lebih baik mengurus urusan domestik daripada harus keluar mencari pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian (Nieuwenhuis et al., 2019). Adanya konstruksi mengenai peran perempuan, mengakibatkan kemiskinan tidak kunjung usai dikarenakan hampir setengah dari total populasi di dunia dipaksa untuk tidak berkembang dengan tidak diberikannya akses yang sama untuk membantu memberantas kemiskinan (Bank, 2019). Kemiskinan yang terjadi berakibat pada beberapa masalah lain seperti sulitnya akses kesehatan, dan juga rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan rendahnya pendapatan sehingga kemiskinan akan terus berjalan dan tidak kunjung usai.

Gambar 1. 1 Angka Kemiskinan di Dunia Pada Tahun 2017



Sumber: *Global Affairs Canada. Feminist International Assistance Policy* (Global Affairs Canada, 2017b)

Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dimana terdapat kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup, makan, air, tempat tinggal dan pakaian. Tetapi dunia saat ini telah memperluas definisi kemiskinan mencakup akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan juga transportasi (World Vision, 2020). Data kemiskinan diatas merupakan data *World Economic Forum* pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa negara yang menjadi negara paling miskin di dunia adalah India yang mencapai 175 juta orang, disusul oleh Nigeria dengan 86 juta orang dan juga Republik Demokratik Kongo dengan jumlah 55 juta orang. Wilayah yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan jumlah paling tinggi di dunia adalah Sub Sahara Afrika dengan 411.3 juta orang disusul Asia Selatan dengan 216,4 juta jiwa, di urutan ketiga adalah Asia Timur dan Pasifik dengan angka 42,7 juta jiwa. *World Economic Forum* mencatat bahwasanya kemiskinan di dunia pada tahun 2015 masih mencapai angka 10.7% yang disebabkan oleh konstruksi gender dimana perempuan memiliki akses yang terbatas bahkan tidak mendapatkan akses dalam meningkatkan perekonomian (World Vision, 2020).

Menurut Deklarasi Beijing 1995 dari Konferensi PBB dan juga Deklarasi Rio 1992 mengakui bahwasanya untuk

membentuk pembangunan yang berkelanjutan maka sangat penting untuk memberdayakan perempuan (Lefton, 2013) sehingga Kanada mencoba mengeluarkan kebijakan yang berupaya untuk memberdayakan perempuan demi mengatasi kemiskinan.

Kanada merupakan negara yang terletak di benua Amerika yang menggunakan sistem pemerintahan federal dan menjadi negara yang sudah menjalankan kesetaraan gender didalam kehidupan berwarga negara dan juga pemerintahan. Dimulai sejak tahun 1950an yang kemudian berkembang hingga pada tahun 2007 Kanada telah mencapai hampir seperempat kabinet pemerintahan adalah perempuan (Tremblay, 2013). Perlahan Kanada mulai membentuk kebijakan-kebijakan maupun lembaga yang fokus pada permasalahan perempuan seperti *The Canadian Women's Foundation*. Lembaga perempuan Kanada ini mencoba mengambil pendekatan kepada feminis dan kesetaraan gender yang berkomitmen untuk kesetaraan gender. Lebih dari tiga tahun, pemerintahan federal menguatkan *Gender Governance Framework* melalui pengembangan kebijakan, alat dan struktur akuntabilitas untuk mempromosikan kesetaraan dan pengarusutamaan gender atau penerapan, analisis, implementasi dan pemantauan terhadap kebijakan dan program dengan mencegah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Pentingnya peran perempuan dan anak perempuan dalam mengatasi permasalahan ini membuat Kanada mengeluarkan kebijakan *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) pada 2017 yang diharapkan dapat berlaku untuk semua orang dan memajukan perempuan dan anak perempuan sebagai agen untuk memberantas kemiskinan (Ignjatović & Bošković, 2018). Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendorong rencana *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 dalam mengentaskan kemiskinan dengan mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dengan mempromosikan kesetaraan gender terutama di negara berkembang dan mendorong partisipasi wanita mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan.

Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan merupakan solusi dalam menyelesaikan ketidaksetaraan gender di dunia yang menjadi penyebab permasalahan termasuk kemiskinan. Melalui kebijakan FIAP, Kanada mencoba mempromosikan kesetaraan gender dan menurut penelitian oleh Putri Vannisa Wulandari (2020) yang berjudul “Peran *United Nations Entity On Gender Equality And The Empowerment Of Women* (UN Women) Dalam Kebijakan Luar Negeri Berbasis Gender Di Kanada (2015-2019)”, menyimpulkan bahwa kebijakan ini yang bekerjasama dengan UN Women merupakan kebijakan yang berkontribusi besar terhadap perkembangan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dunia Internasional. Pada tulisan tersebut juga dibahas dengan rinci mengenai proses pengaplikasian kebijakan ini bersama dengan PBB secara terstruktur. Namun dalam tulisan tersebut belum memiliki data yang menyebutkan dengan jelas pengaruh kebijakan ini terhadap negara penerima bantuan sehingga dalam skripsi ini akan dibahas pengaruh kebijakan ini kepada negara penerima donor terutama dalam usaha mengurangi kemiskinan di negara berkembang salah satunya adalah Afghanistan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, dapat dirumuskan sebuah pertanyaan “**Mengapa Kanada mengimplementasikan *Feminist International Assistance Policy* pada masa Pemerintahan Justin Trudeau?**”

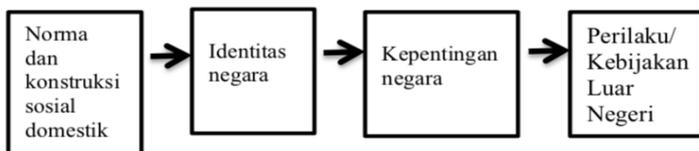
C. Kerangka Teori

Untuk dapat menganalisa penelitian lebih dalam, skripsi ini menggunakan kerangka berpikir untuk dapat membangun variabel-variabel yang dapat membangun sebuah fakta penelitian yang valid dan mampu menjawab rumusan masalah yang ada. Tulisan ini menggunakan Teori Konstruktivisme (*State Identity*) sebagai acuan utama dalam menganalisis Mengapa Kanada Mengimplementasikan *Feminist International Assistance Policy* pada masa Pemerintahan Justin Trudeau.

1. Teori Konstruktivisme (*State Identity*)

Alexander Wendt menjelaskan bahwa apa yang dilihat dari dunia adalah bentuk konstruksi sosial bukan material. Kemudian dalam melihat bagaimana kebijakan oleh suatu negara yang diambilnya dapat dilihat dari konstruktivisme *State Identity* yang beranggapan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara berasal dari norma dan identitas negara yang dikonstruksi oleh masyarakat yang kemudian menghasilkan kepentingan yang menentukan jenis kebijakan yang diambilnya. Konstruktivisme memiliki isu utama yaitu norma, identitas dan juga kepentingan. Norma yang dianut masyarakat kemudian membentuk identitas yang menentukan kepentingan yang mempengaruhi kebijakan suatu negara.

Gambar 1. 2 Skema Pendekatan Konstruktivis *State Identity*



Sumber: *The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical Analysis* (Alexandrov, 2003)

Pada bagan diatas dijelaskan bahwa proses konstruktivisme terdiri dari norma yang dipengaruhi oleh budaya yang dikonstruksi oleh masyarakat dan menghasilkan norma yang mempengaruhi identitas suatu negara. Identitas suatu negara membentuk kepentingan yang menghasilkan tindakan negara yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil. Teori ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan alasan mengapa Kanada mengimplementasikan *Feminist International Assistance Policy* Pada Masa Pemerintahan Justin Trudeau dengan implementasi sebagai berikut;

Gambar 1. 3 Implementasi Teori



Norm / Norma

Constructivism (State Identity) menjelaskan bahwasanya norma adalah seperangkat nilai dianggap benar dalam suatu tatanan masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Kanada merupakan salah satu negara yang telah berhasil dalam mengimplementasikan kesetaraan gender di dalam kehidupan bernegara. Sejak tahun 1970-an Kanada mulai melanjutkan untuk mendesain ulang negaranya yang semula dominan dengan budaya Inggris dan Perancis. Pierre Trudeau yang kala itu menjadi Perdana Menteri Kanada mengumumkan kebijakan multikulturalisme pada tahun 1971 dimana kebijakan ini merupakan kebijakan yang diambil karena penolakannya terhadap konsep *Lei Kultural* yang dibentuk oleh Mackenzie King pada tahun 1948. Kemudian *The Canadian Constitution* yang disahkan oleh Perdana Menteri Pierre Trudeau pada tahun 1982, didalamnya terdapat Piagam Hak dan Kebebasan yang merupakan konstitusi hukum tertinggi di Kanada yang berisikan pernyataan bahwa kaum minoritas memiliki hak yang sama dengan warga Kanada termasuk hak kesetaraan (Canada, Government of, 2017).

Multikulturalisme secara fundamental yaitu tentang perlakuan terhadap imigran yang kemudian menetap dalam suatu negara (Kymlicka, 2020), Kemudian melalui kebijakan ini, Kanada menuju kepada negara dengan keterbukaan akan perbedaan sehingga pada tahun 1990an dan awal 1980an konsep dimana rasisme dan diskriminasi harus diberantas kemudian mendominasi budaya politik di Kanada. Pada tahun 1988, Undang-undang multikulturalisme di negara ini pertama kali diperkenalkan kemudian disusul dengan

pendistribusian dana-dana federal dengan tujuan agar kelompok-kelompok etnis minoritas di Kanada melestarikan kebudayaannya masing-masing. Keberagaman budaya, ras, maupun agama merupakan konsep yang sudah tertanam dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kanada saat ini.

Pada 17 Desember 2006, Pemerintah Kanada mengeluarkan kebijakan “*Turning Equality in Law into Equality in Fact*” dengan tujuan melakukan tindakan-tindakan konkret mengenai hak-hak perempuan yang telah diakui oleh Piagam Kemanusiaan Kanada dan komitmen Internasional serta wanita dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dan juga pemain kunci dalam masalah kesetaraan gender. Di dalam kebijakan ini terdapat *Gender Based Analysis* (GBA) sebagai alat tata pemerintahan untuk melakukan tindakan sektoral secara bertahap mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam seluruh keputusan pemerintah serta pihak-pihak dalam badan pengambilan keputusan lokal maupun regional yang menjadikan kebijakan ini sebagai dasar dari kebijakan gender lainnya. Pada masa pemerintahan Justin Trudeau, Kanada mengimplementasikan kebijakan gender dengan dipilihnya 18 perempuan dan 19 laki-laki dalam jumlah total 37 Menteri Kanada yang berasal dari latar belakang yang berbeda.

State Identity / Identitas Negara

State identity atau identitas negara secara kuat menyiratkan preferensi dan juga sebab akibat dari tindakan yang diambil negara dimana identitas negara digunakan sebagai alat pemahaman terhadap suatu negara (Alexandrov, 2003). Identitas terbentuk dari proses sosial dimana setelah terkristalisasi, identitas dapat di modifikasi, dipertahankan atau bahkan dibentuk kembali oleh struktur sosial (Berger & Luckmann, 2016). Identitas negara diperlukan dalam politik Internasional dan juga masyarakat domestic dimana apabila suatu negara tidak memiliki identitas maka akan terjadi kekacauan dimana tidak adanya nilai kesatuan yang dapat digunakan dalam kehidupan bernegara dan tidak ada landasan untuk menentukan kepentingan suatu negara (Onuf, 2002).

Identitas juga merupakan suatu nilai dimana individu, kelompok, masyarakat atau komunitas politik menentukan apa yang baik ataupun apa yang harus ditentang dalam masyarakat (Moore, 2010). Selanjutnya konstruktivisme mengasumsikan bahwa identitas cenderung pada konteks sejarah budaya, politik dan sosial. (Theys, 2018). Konsep identitas dapat dikonseptualisasikan dalam tiga premis; pertama adalah bahwa identitas merupakan hasil dari konstruksi sosial bukan hakiki, mereka berhubungan dan melibatkan rujukan dari ke berbagai pihak lain yang signifikan, terakhir identitas memiliki banyak pemikiran, struktur naratif (Berg & Ehin, 2013).

Kebijakan yang diambil Kanada menyesuaikan dengan identitas negara dimana dalam penjelasan ini Kanada merupakan sebuah negara dengan identitas *Middle Power* atau juga dikenal sebagai negara yang dalam konteks kekuatan internasional maupun pengaruhnya dalam sistem dunia, tidak termasuk negara yang besar dan tidak juga kecil. Dalam pengambilan kebijakan, negara *middle power* memiliki karakteristik dimana negara tersebut memiliki kecenderungan untuk mencari solusi multilateral untuk permasalahan-permasalahan internasional, mengajukan kompromi, dan juga menjadi bagian dari penyelesaian solusi untuk masalah di tingkat internasional (Jordaan, 2003). Dalam sistem internasional, negara yang berada di dalam kelompok negara *middle power* tidak memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mengatur arah sistem internasional dibandingkan negara-negara besar (Alvian et al., 2017). Kanada sebagai negara *middle power* membuatnya berperan aktif dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan yang bersifat global diantaranya adalah *development issues*. Dengan membentuk *development assistance* Kanada ingin menunjukkan bahwasanya Kanada turut andil dalam membantu menyelesaikan permasalahan dunia yaitu mengatasi kemiskinan (Jordaan, 2003).

State Interest / Kepentingan Negara

State Interest adalah hasil dari identitas negara dimana identitas tersebut memiliki peran penting dalam pengaruhnya terhadap kepentingan negara. Kepentingan negara sendiri

diartikan sebagai apa yang menjadi perhatian publik yang kemudian ditangani oleh pemerintah dalam lingkup kebijakan ataupun undang-undang. Kepentingan sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan politik yang secara intersubjektif yaitu pandangan atau kesepakatan yang sama dalam definisi suatu objek yang diadakan dalam suatu kelompok sosial. Kepentingan negara juga merupakan konstruksi sosial yang dan berjalan sesuai dengan kepentingan sosial bukan individu (Barkin, 2003). Sebagai negara yang memiliki identitas multikulturalisme yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, Kanada berjalan untuk kepentingannya sesuai dengan identitas yang dianut. FIAP sebagai kebijakan luar negeri Kanada merupakan hasil dari identitas dan juga ketertarikan Kanada pada isu kesetaraan gender. Kemiskinan sendiri merupakan permasalahan dari negara Kanada untuk diselesaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan akar dari permasalahan-permasalahan seperti angka pendidikan yang rendah, angka kesehatan yang buruk seperti gizi buruk. Dalam dunia politik, kemiskinan yang dialami suatu negara juga berakibat pada hubungannya dengan negara-negara dimana kemudian lain.

Negara berkembang merupakan negara yang masih berada dalam kemiskinan dimana salah satu factor kemiskinan disebabkan oleh masih banyaknya negara yang tidak mengizinkan ataupun membatasi perempuan dan anak perempuan untuk turut andil dalam meningkatkan perekonomian negara. Kanada tertarik akan isu kesetaraan gender dimana konstruksi sosial masyarakat di negara ini percaya bahwasanya perempuan dan anak perempuan apabila dilibatkan dalam perekonomian dan juga pengambilan keputusan maka akan terjadi perubahan sistem sosial yang dapat memajukan negara sehingga kemiskinan di negara berkembang dapat teratasi. Kepentingan dari Kanada untuk memajukan perempuan dan anak perempuan demi terciptanya dunia yang aman, damai dan inklusif menjadikan Kanada mengambil kebijakan luar negeri *Feminist International Assistance Policy* (Global Affairs Canada, 2020).

State Action / Aksi Negara

State action atau aksi negara merupakan langkah negara

menentukan sebuah kebijakan yang dilandaskan pada norma, identitas, dan juga kepentingan negara. *State Action* pada kepentingan negara untuk mengurangi kemiskinan dengan mempromosikan kesetaraan gender pada pemerintahan Justin Trudeau dituangkan dalam kebijakan *Feminist International Foreign Policy* dengan nama *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). Kebijakan ini diambil menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk berkontribusi dalam upaya global untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun dunia yang lebih damai, aman, inklusif, dan sejahtera dengan mempromosikan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender (Global Affairs Canada, 2017). Kanada percaya, untuk mengentaskan kemiskinan dunia, perempuan dan anak perempuan harus diberdayakan untuk mencapai potensi penuh untuk membantu mengangkat ekonomi keluarga dan negara. Dengan mempromosikan kesetaraan gender, tujuan Internasional untuk mengurangi kemiskinan akan tercapai mengingat perempuan dan anak perempuan jumlahnya mencapai setengah dari jumlah populasi di dunia.

FIAP bekerjasama dengan kelompok hak asasi wanita lokal khususnya dalam bidang seksual dan kesehatan reproduksi mencoba memerangi pernikahan dini dan pernikahan paksa, mendorong perempuan dan anak perempuan andil dalam akses ekonomi formal, dan juga proses pengambilan keputusan. Kanada memiliki kapasitas untuk memainkan peran utama dan mengambil kesempatan untuk mengimplementasikan visi barunya untuk bantuan Internasional mendukung agenda 2030 untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas bantuan internasional, memberikan lebih banyak dukungan terintegrasi dan responsif, berinvestasi lebih banyak dalam inovasi dan penelitian, dan menjadi lebih banyak transparan dalam hasil dan kegiatan dengan berkonsentrasi pada bantuan internasional. Kanada akan membantu meningkatkan kehidupan orang yang paling miskin dan yang paling rentan, termasuk mereka yang hidup rapuh. FIAP adalah upaya Kanada untuk membantu dunia internasional karena solidaritas internasional adalah nilai

Kanada sehingga Kanada mencoba memberikan bantuan dengan tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan keamanan global, pendidikan, perlindungan lingkungan dan pertumbuhan yang bekerja untuk semua orang (Global Affairs Canada, 2017a).

2. Pendekatan *Gender and Development*

Gender and Development (GAD) mengacu kepada perspektif dan proses dalam pembangunan yang memberdayakan dan partisipatif, adil, berkelanjutan, bebas dari kekerasan, menghormati hak asasi manusia, mendukung kemandirian dalam mengaktualisasi potensi manusia. GAD berusaha untuk mencapai kesetaraan gender sebagai nilai fundamental yang harus tercermin dalam pembangunan dan berpendapat bahwa perempuan merupakan agen perubahan yang aktif dan bukan hanya sebagai penerima pembangunan yang pasif. Dikembangkan pada 1980-an, GAD menjadi alternatif dari pendekatan *Women in Development* (WID) dikarenakan WID yang memfokuskan perhatian kepada perempuan, sedangkan GAD menetapkan peran, tanggung jawab dan juga harapannya kepada laki-laki dan perempuan untuk kesetaraan gender (Republic of the Philippines Congress of the Philippines Metro Manila Third Regular Session, 2009).

Skripsi ini menggunakan GAD untuk menganalisa mengapa Kanada mengadopsi *Feminist International Foreign Policy* dengan *Feminist International Assistance Policy*. Kebijakan ini diambil menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan untuk turut andil dalam perekonomian sehingga kedudukan perempuan dan laki-laki setara untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan negara. Menurut data *world bank*, apabila perempuan tidak dilibatkan dalam perekonomian maka negara akan mengalami kerugian sebanyak jumlah perempuan yang dipaksa untuk tidak bekerja. Untuk mengentaskan kemiskinan dunia, perempuan dan anak perempuan harus diberdayakan untuk mencapai potensi penuh untuk membantu mengangkat ekonomi keluarga dan negara. FIAP akan membantu melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia semua

kelompok yang rentan maupun terpinggirkan terutama perempuan dan anak perempuan untuk meningkatkan mereka dalam partisipasi pengambilan kebijakan (Global Affairs Canada, 2017a), sehingga hal ini akan membantu mencapai akses yang lebih adil dalam masyarakat sehingga mereka dapat mengontrol atas sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengamankan kesetaraan dan ekonomi berkelanjutan.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah;

1. Mengetahui alasan mengapa Kanada mengimplementasikan *Feminist International Assistance Policy* pada masa Pemerintahan Justin Trudeau.
2. Untuk mengetahui mengapa *gender equality* mempengaruhi tingkat kemiskinan di negara berkembang.

E. Hipotesis

Kanada mengimplementasikan *Feminist International Assistance Policy* karena;

1. Kanada menjunjung tinggi kesetaraan gender di negaranya dengan memberikan akses yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam partisipasi ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan.
2. Kanada ingin muncul sebagai negara Middle Power yang berperan aktif dalam membantu menyelesaikan *Sustainable Development Goals 2030* yang berfokus pada penghapusan kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.
3. Kanada ingin mempromosikan kesetaraan gender di negara berkembang karena dampak ketidaksetaraan gender menyebabkan tingginya angka kemiskinan, sehingga perempuan dan anak perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan.

F. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi fokus pembahasan

agar tetap sejajar dengan judul yang disajikan. Penulis menganalisa mengenai alasan Kanada Mengimplementasikan *Feminist International Assistance Policy* pada Masa Kepemimpinan Justin Trudeau, khususnya pada tahun 2017-2020. Peneliti memfokuskan penelitian pada tahun 2017 hingga 2020 dikarenakan pada 2017 adalah tahun dibuatnya kebijakan ini, kemudian pada tahun 2020 Kanada masih menerapkan kebijakan hingga saat ini.

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam pengambilan data yang bertujuan untuk mendukung referensi dari penelitian yang telah dibuat. Metodologi ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dimulai dengan memberikan gambaran secara umum latar belakang dan sejarah isu yang akan diteliti dari gambaran kejadian akan dilakukan analisis secara periodik dengan data yang didapatkan. Adapun tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada alasan Kanada Mengimplementasikan *Feminist International Assistance Policy* pada Masa Kepemimpinan Justin Trudeau.

2. Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Data sekunder yang digunakan berupa literatur seperti skripsi, tesis, jurnal artikel, buku, website, dan berbagai sumber online lainnya yang berhubungan dengan Implementasi *Feminist International Assistance Policy* pada Masa Kepemimpinan Justin Trudeau.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kepustakaan yang memanfaatkan referensi dan sumber berupa artikel, jurnal, buku, skripsi, tesis

dan berbagai referensi *online* dan *offline*. Pendekatan kepastakaan ini juga menggunakan analisa Alasan Kanada Mengimplementasikan *Feminist International Assistance Policy* pada Masa Kepemimpinan Justin Trudeau.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi literatur dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan kepastakaan. Beberapa studi literatur yang digunakan yang berasal dari jurnal, buku, *website* resmi pemerintahan Kanada, *website* lainnya dan beberapa berita yang berhubungan dengan topik penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dijelaskan dengan rinci dan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari;

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, tujuan penelitian, selanjutnya terdapat hipotesis sebagai dugaan awal mengenai jawaban atas rumusan masalah, jangkauan penelitian, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: PERKEMBANGAN FEMINISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI BERBASIS GENDER DI KANADA

Menjelaskan tentang perjuangan feminisme di dunia dan perkembangan feminisme di Kanada serta tokoh dan kebijakan berbasis gender di Kanada.

BAB III: ANALISIS ALASAN KANADA MENGIMPLEMENTASIKAN *FEMINIST INTERNATIONAL ASSISTANCE POLICY* PADA MASA PEMERINTAHAN JUSTIN TRUDEAU

Memuat mengenai analisis alasan mengapa Kanada mengimplementasikan kebijakan ini, kemudian akan dibahas

norma kesetaraan gender Kanada, identitas Kanada sebagai negara *middle power*, kepentingan dalam mengentaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, serta perempuan dalam pembangunan.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab terakhir sekaligus penutup dalam skripsi bab ini, dan pada bagian ini akan memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.